



LAPORAN EVALUASI KINERJA

TRIWULAN IV
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Dinas Perikanan Tahun 2025" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya dalam kaitan terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Dinas Perikanan Tahun 2025 menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam merealisasikan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Perikanan Tahun 2025. Laporan ini menjelaskan tentang pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan dari berbagai sumber anggaran baik APBD Kabupaten Luwu Timur (DAU dan DAK), APBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun APBN, yang memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta berdampak nyata terhadap pencapaian target indikator kinerja Kunci (IKK).

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Dinas Perikanan Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang kelautan dan perikanan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan sektor perikanan secara umum di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan. Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran dan *stakeholder* terkait lainnya, kondisi ini merupakan

modal dasar yang sangat penting dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur sehingga bisa lebih maju dan lebih unggul, ditengah-tengah semakin tingginya tantangan dan permasalahan, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada Tim Penyusun Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Dinas Perikanan Tahun 2025, yang telah berupaya bekerja keras dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas yang diamanahkan sehingga Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Dinas Perikanan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Kami menyadari laporan ini masih mengandung sisi kelemahan dan kekurangan, sehingga dengan hati, terbuka dan ikhlas, kami senantiasa menyambut baik atas segala bentuk kritik positif serta saran konstruktif dari semua pihak dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan ini pada masa mendatang. Akhir kata, dengan mengharap ridho dan pertolongan Allah SWT, semoga Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Dinas Perikanan Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembangunan disegala bidang.

Malili, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS

ANDI WIJA HASAN, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 197403232003121004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan pelayanan terhadap kelompok nelayan, petani tambak, dan masyarakat pesisir pada umumnya diwujudkan dengan pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021. Adapun **Visi** Dinas Perikanan sejalan dengan **Visi** Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yaitu “**Luwu Timur Maju dan Sejahtera**”.

Berkaitan dengan berakhirnya Triwulan IV Tahun 2025, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur, wajib melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Realisasi pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan pada pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 yang secara khusus dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama melalui pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Produktivitas Perikanan

Sasaran ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja:

1. Jumlah Produksi Perikanan (Ton)

Jumlah Produksi Perikanan adalah Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan peningkatan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/ tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan.

2. Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)

Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan adalah Kegiatan transformasi bahan baku hasil perikanan (seperti ikan, udang, rumput laut) menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi yang lebih tinggi melalui proses pengolahan.

3. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) adalah Indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemampuan tukar hasil produksi perikanan terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi dan produksi, dimana nilai lebih dari 100 menunjukkan pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran.

Sasaran II : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)

Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah Hasil penilaian system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mana system ini merupakan integrasi dari system perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan.

Pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 untuk semua sasaran berikut indikator kinerjanya secara umum berhasil. Ada beberapa indikator yang belum terealisasi atau masih dibawah target, namun secara keseluruhan capaian rata-rata kegiatan cukup baik atau memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka pencapaian sasaran tahun 2025 lebih baik.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Dinas Perikanan Tahun 2025 ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Dinas Perikanan Tahun 2025 dimasa yang akan datang.

Malili, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS

ANDI WIJA HASAN, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip 197403232003121004



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Ikhtisar Eksekutif	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Diagram	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat	2
1. Maksud	2
2. Tujuan	2
3. Manfaat	3
I.3 Gambaran Umum Daerah	3
1. Luas dan Batas Wilayah Geografis	3
2. Potensi Perikanan	3
I.4 Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
II.1 Perencanaan Strategis	11
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
III.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	17
III.2 Capaian Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2025	18
BAB IV PENUTUP	28
IV.1 Kesimpulan	28
IV.2 Saran	28
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Tahun 2025-2029.....	12
Tabel 2.2.	Perjanjian Kerja Eselon II.....	13
Tabel 2.3.	Perjanjian Kerja Eselon III Sekretaris.....	14
Tabel 2.4.	Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Perikanan Tangkap.....	14
Tabel 2.5.	Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Perikanan Budidaya	14
Tabel 2.6.	Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan.....	15
Tabel 2.7.	Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	15
Tabel 2.8.	Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	15
Tabel 2.9.	Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan.....	16
Tabel 3.1.	Pengukuran Perjanjian Kerja Eselon II Triwulan IV	18
Tabel 3.2.	Capaian Jumlah Produksi Perikanan Triwulan IV Tahun 2025.....	20
Tabel 3.3.	Capaian Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan Triwulan IV Tahun 2025	22
Tabel 3.4.	Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) Triwulan IV Tahun 2025	24
Tabel 3.5.	Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan Triwulan IV Tahun 2025.....	25
Tabel 3.6.	Data per Jenis Ikan Laut	26
Tabel 3.7.	Data per Jenis Ikan Danau.....	26
Tabel 3.8.	Data Produksi Perikanan Budidaya per Komoditi.....	23

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1.	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Triwulan IV Tahun 2022-2025.....	21
Diagram 3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan Triwulan IV Tahun 2022-2025	23
Diagram 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidya Perikanan (NTPi) Triwulan IV Tahun 2022-2025	24



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kertas Kerja Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2025
Lampiran 2	Dokumentasi Evaluasi Internal
Lampiran 3	Dokumentasi Kegiatan





Bab 1

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) merupakan amanat dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada pasal 3 dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Salah satu asas dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yakni asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa laporan yang diberi nama Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Dinas Perikanan Tahun 2025. Laporan tersebut harus memberikan gambaran yang luas dan subyektif mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan serta indikator makro, baik pada aspek keberhasilan maupun aspek ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada periode tertentu.

Dasar hukum penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan Triwulan IV Tahun 2025 adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Dinas Perikanan Tahun 2025.

I.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dinas atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja daerah yang sudah diperjanjikan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan Triwulan IV Tahun 2025 adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur, akurat dan obyektif kepada pemberi mandat atas capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada Triwulan IV tahun 2025, baik yang bersifat keberhasilan maupun kegagalan.
- b. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas instansi serta meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah.
- c. Sebagai bahan evaluasi dan bahan perbaikan secara berkesinambungan bagi dinas untuk meningkatkan kinerja pada periode yang akan datang.

3. Manfaat

Manfaat penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan Triwulan IV Tahun 2025 adalah:

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Bahan masukan bagi penyempurnaan dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja pada periode yang akan datang;
- c. Bahan penyempurnaan pengelolaan program dan kegiatan pada periode berikutnya;
- d. Bahan masukan dan pertimbangan pengambilan kebijakan bidang agroindustri dan ketahanan pangan.

I.3 GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Luas dan Batas Wilayah Geografis

Kabupaten Luwu Timur, memiliki luas wilayah 6.994,88 km² atau 11,14% luas Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 11 kecamatan dan terdapat 127 Desa/Kelurahan. Secara geografis Kabupaten Luwu Timur berada disebelah Selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak diantara 2°03'00" - 3°03'25" LS dan 119°28'56" - 121°47'27" BT. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.

2. Potensi Perikanan

Potensi dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Timur secara umum sangat besar dan menjanjikan. Jenis komoditi yang dapat dikembangkan merupakan komoditi ekspor dengan potensi produksi skala besar. Hal ini didukung dengan ketersediaan lahan produksi yang sangat luas dan layak serta dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai yang terdiri dari:



- ❖ Panjang garis pantai : 117,4Km
- ❖ Luas perairan otonomi : 48.050 Km²
- ❖ Luas Tambak : 12.061,89 Ha
- ❖ Luas Budidaya Rumput Laut : 1.961,50 Ha
- ❖ Luas Budidaya Air Tawar : 590 Ha

Potensi sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Luwu Timur secara umum mencakup Potensi Perikanan Tangkap dan Potensi Perikanan Budidaya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur. Hal ini didukung dengan letak geografis Kabupaten Luwu timur yang terdiri dari wilayah laut dan darat dengan 9 (sembilan) sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Luwu Timur melintasi kecamatan. Sungai terpanjang yaitu Sungai Kalaena dengan panjang 85 Km dan yang terpendek Sungai Bambalu dengan panjang 15 Km. Selain itu terdapat 5 (lima) danau alami yang sangat indah dan dipertahankan kealamiannya yaitu Danau Matano (dengan luas 245,70 km²), Danau Mahalona (25 km²), Danau Towuti (585 km²), Danau Taparang Masapi (2,43 km²) dan Danau Lontoa (1,71 km²). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan 4 (empat) danau lainnya tersebar di Kecamatan Towuti. Berikut perkembangan perikanan di Kabupaten Luwu Timur:

a. Potensi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya merupakan salah satu potensi investasi yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini didukung dengan potensi lahan yang layak untuk budidaya sangat luas. Tingkat pemanfaatan lahan untuk pengembangan komoditi perikanan budidaya sampai dengan saat ini belum mencapai 30 % dari potensi lahan yang dapat dikembangkan sehingga target produksi yang dicapai pun masih sangat rendah dari potensi produksi yang dapat dicapai.

Adapun potensi perikanan budidaya Kabupaten Luwu Timur secara umum meliputi :



✚ Potensi Perikanan Budidaya di Air Laut

Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi kawasan budidaya laut yang cukup besar di wilayah perairan teluk Bone, dengan garis pantai 117,4 km sepanjang pesisir Kec. Burau, Wotu, Angkona dan Malili. Kondisi perairan laut yang masih alami dan tidak mengalami pencemaran merupakan salah satu faktor utama yang mendukung pengembangan potensi budidaya laut di wilayah ini. Komoditi unggulan yang dapat dikembangkan antara lain :

1) Komoditi Teripang dan Lobster

Teripang dan Lobster sebagai salah satu komoditi ekspor di Kabupaten Luwu Timur belum dikelola dengan baik oleh para nelayan di Kabupaten Luwu Timur karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknik penangkapan maupun budidaya Lobster Laut. Untuk itu, perlu menjaga kelestarian ekosistem teripang dan lobster di Bumi Batara Guru dari aktivitas penangkapan secara besar-besaran dan tidak bertanggungjawab.



2) Komoditi Rumput Laut *Euchema Cottonii*

Budidaya rumput laut *Euchema Cottonii* merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang dibudidayakan di kawasan perairan Teluk Bone sepanjang pantai pesisir Kabupaten Luwu Timur khususnya di perairan Kec.Burau sampai pantai Wotu. Luas Lahan untuk pengembangan rumput laut *Euchema Cottonii* di Bumi Batara guru mencapai **1.961,5 Ha** dengan kisaran produksi

212.391,26 ton kering per tahun dengan asumsi produktivitas rata-rata **15.000 kg/Ha kering**.



✚ **Potensi Perikanan Budidaya Air Payau**

Produksi perikanan budidaya air payau atau tambak di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan ketersediaan lahan tambak untuk budidaya yang cukup luas mencapai 12.061,89 Ha.

1) Komoditi Rumput Laut *Gracillaria* sp

Komoditi Rumput laut *Gracillaria* sp merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang telah berhasil dikembangkan dan dibudidayakan. Potensi Pengembangan Rumput Laut *Gracillaria* sp di Bumi Batara Guru didukung dengan ketersediaan lahan yang layak untuk budidaya seluas **11.681,89 Ha** dengan kisaran produksi mencapai **156.026,57 ton kering per tahun** dengan asumsi produktivitas rata-rata **4.000 kg/Ha kering**.



2) Komoditi Ikan Bandeng

Ikan Bandeng merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang saat ini menempati peringkat terbaik di Propinsi Sulawesi Selatan. Komoditi ini

dibudidayakan pada 4 (empat) wilayah kecamatan pesisir untuk memenuhi kebutuhan domestik dan daerah lainnya baik di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Potensi Pengembangan Ikan Bandeng di Bumi Batara Guru didukung dengan ketersediaan lahan yang layak untuk budidaya seluas **12.061,89 Ha** dengan kisaran produksi mencapai **14.644,6 ton per tahun** pada tingkat produktivitas rata-rata **1.214 kg/Ha**.



3) Komoditi Udang Windu/Vanamae

Udang merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang dibudidayakan oleh masyarakat dengan potensi usaha yang cukup baik serta segmentasi pasar yang sangat tinggi. Secara umum jenis udang yang paling banyak dikembangkan oleh para pembudidaya adalah Udang Windu dan Udang Vanamae. Terdapat juga udang laci-laci dan udang Galah.

Luas lahan untuk pengembangan budidaya udang di Bumi Batara Guru mencapai **12.061,89 Ha** dengan kisaran produksi sebesar **3.391,01 ton/tahun** pada tingkat produktivitas **750 kg/Ha**.



Budidaya Air Tawar

Potensi pengembangan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Luwu Timur secara umum dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan. Hal ini didukung dengan ketersediaan air yang melimpah dan layak bersumber dari sungai, irigasi dan danau. Potensi lahan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Kolam Air Tawar

Budidaya ikan dengan kolam air tawar merupakan salah satu metode budidaya yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur di seluruh kecamatan. Komoditi ikan yang umum dikembangkan adalah Ikan Lele, Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Gurami dan Ikan Bawal yang dibudidayakan untuk menyuplai kebutuhan domestik maupun kebutuhan luar daerah.



b. Potensi PerikananTangkap

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Luwu Timur cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam dan luar daerah. Adapun potensi perikanan tangkap yang dominan berasal dari jenis ikan pelagis kecil seperti tembang, teri, kembung, dll. Lokasi perikanan tangkap tersebar di 4 (empat) kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Malili, Angkona, Wotu dan Burau. Komoditas yang dihasilkan dari aktifitas penangkapan antara lain cakalang, tuna, tenggiri, layang, kembung, kerapu, cucut, teri, kepiting, kakap, bawal, baronang dan jenis ikan lainnya yang setiap musim dapat menghasilkan

produksi yang cukup tinggi. Data Perikanan Tangkap Tahun 2023 menunjukkan:

- 1) Jumlah RTP Nelayan 1.982 RTP
- 2) Jumlah Alat tangkap terdiri dari Jaring Insang, Pukat Tarik/Pukat Pantai, Pancing Tonda, Bagang Apung, Purse Seine dan Rawai Dasar, Sero, Rakkang/Perangkap, Bubu, Payang, dan Anco.
- 3) Jenis Ikan yang tertangkap :
 - Pelagis besar: Tongkol, Cakalang, dan Tenggiri
 - Pelagis kecil : Layang, Kembung, Teri, dan Belanak
 - Demersal : Cucut, Kerapu, Kakap, Bawal dan Baronang
- 4) Armada :
 - ✓ Perahu tanpa motor : 37 unit
 - ✓ Perahubermotor : 1.920 unit
 - ✓ Kapal Motor : 57 unit



I.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang berkembang dalam pelaksanaan pembangunan Perikanan selama ini banyak dipengaruhi oleh globalisasi baik dari aspek ekonomi global maupun isu dunia tentang lingkungan, maka dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

- a. Permintaan pasar dunia akan komoditi perikanan lebih diutamakan dari komoditi budidaya, hal ini berkaitan dengan aspek lingkungan sumberdaya;
- b. Komoditi hasil perikanan tangkap sangat ketat terutama dari cara/metode, teknik dan alat yang digunakan karena hal ini dipantau oleh Uni Eropa;
- c. Menurunnya kualitas sumberdaya perikanan sebagai akibat dari *Illegal fishing* dan meningkatnya kebutuhan penduduk akan lahan hunian dan lahan usaha;
- d. Sarana dan prasarana budidaya khususnya budidaya air payau dan laut relative masih terbatas, demikian juga dengan usaha penangkapan ikan sehingga produksi dan produktivitas masih terbatas;
- e. Pasca panen hasil perikanan belum dikelola secara optimal; dan
- f. Belum adanya penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sehingga masih terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang antara pembangunan ekonomi atau manufaktur dengan pembangunan perikanan.

Tantangan utama pembangunan sektor perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah Mewujudkan Target Kinerja RPJMD 2025-2029 sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dan Kegiatan Prioritas (KP 1) yaitu :

1. Sarana dan Prasarana Pembudidaya Rumput Laut
 - Sarana Pembudidaya Rumput Laut 100 Kelompok
 - Prasarana Pembudidaya Rumput Laut 29 Unit
2. Pemberian sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan (75 Kelompok)
3. Pengembangan Pasar Ikan Rakyat Terpadu dengan Wisata Kuliner (2 Unit)

Bab II

Perencanaan Kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah suatu langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan actual/kekinian dari masyarakat sasarnya, yang diselaraskan dengan visi dan misi organisasi serta mempertahankan factor kekuatan, tantangan, hambatan serta peluang yang membentang di depan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Perikanan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Rencana strategis tersebut dimaksudkan untuk membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran perencanaan tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah.

Adapun **Visi** Dinas Perikanan sejalan dengan Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Perikanan yang Maju Dan Sejahtera”**

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan strategis merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang menggambarkan arah strategik organisasi untuk meletakkan

kerangka prioritas dengan memperhatikan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pembagian misi. Adapun tujuan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 :
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan
Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1. Peningkatan jumlah armada/kapal penangkap ikan; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan tangkap; 3. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan; 4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan; 5. Pembinaan nelayan, petani ikan dan pengusaha perikanan; 6. Konservasi terumbu karang di wilayah pesisir Kab. Luwu Timur; 7. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan 8. Pembinaan SPDN.
			2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana Balai Benih Ikan (BBI); 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana budidaya perikanan; 3. Peningkatan akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan; 4. Peningkatan akses informasi dan teknologi perikanan; 5. Penyediaan data kelautan dan perikanan; dan 6. Pengembangan budidaya percontohan air tawar dan air payau.
			3. Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta perbaikan mutu dan daya saing produk perikanan	1. Peningkatan sarana prasarana unit pengolahan ikan (UPI); 2. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan; 3. Peningkatan diversifikasi produk olahan hasil

				perikanan; 4. Peningkatan dan penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan; dan 5. Peningkatan strategi pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan.
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta perencanaan yang SMART

II.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Luwu Timur kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan program/ kegiatan disertai dengan target indikator kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja ini diharapkan terwujud komitmen antara pemberi amanah (Bupati) dengan penerima amanah (Kepala Dinas) dan kesepakatan antara pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Triwulan IV Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

Lampiran : Perjanjian kinerja eselon II

Tabel 2.2 : Perjanjian Kerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	106.307 Ton
		Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	155 Ton
		Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	100 Persen
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	74

Tabel 2.3 : Perjanjian Kerja Eselon III Sekretaris

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	18 Persen
		Persentase Tertib administrasi dan Pelaporan keuangan	25 Persen
		Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar	25 Persen
		Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 %	100 Persen

**Tabel 2.4 : Perjanjian Kerja Eselon III
Bidang Perikanan Tangkap**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.082 Ton
II	Meningkatnya peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku	96 Persen
III	Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	68 Persen
IV	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	6 Persen
V	Tersedianya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	86 Persen
VI	Terlaksananya kegiatan pengawasan sumber daya perikanan	Persentase kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yang dilakukan	100 Persen

**Tabel 2.5 : Perjanjian Kerja Eselon III
Bidang Perikanan Budidaya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	104.225 Ton
II	Terpenuhinya pemberdayaan kepada seluruh Pembudidaya ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses lptek dan informasi dan penguatan kelembagaan	8 Persen

III	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	60 Persen
-----	---	--	-----------

**Tabel 2.6 : Perjanjian Kerja Eselon III
Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	47,59 Kg/Kap/Tahun
II	Meningkatnya Pengelolaan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	100 Persen
III		Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya	83 Persen
IV		Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang	73 Persen

**Tabel 2.7 : Perjanjian Kerja Eselon IV
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terwujudnya penyusunan perencanaan Dinas	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	0 Dokumen
II	Terwujudnya Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD, DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, DPA-SKPD	1 Dokumen
III	Terpenuhinya bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
IV	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	47 Orang
V	Terpenuhinya bahan dan menyusun laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran SKPD	5 Laporan

**Tabel 2.8 : Perjanjian Kerja Eselon IV
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Gedung, Bangunan Kantor lainnya, Kendaraan Dinas operasional atau	17 Unit

		lapangan, Peralatan dan mesin yang dipelihara/direhabilitasi dan dibayarkan pajak dan perizinannya	
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan
II	Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20 Paket
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Laporan
III	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang baik	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
IV	Terwujudnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang baik	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	3 Laporan
V	Terwujudnya pengelolaan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3 Laporan
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 Laporan
VI	Meningkatnya Kompetensi, disiplin, dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0 Orang
VII	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Paket
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	3 Laporan

**Tabel 2.9 :Perjanjian Kerja Eselon IV
Kepala UPTD Balai Benih Ikan**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendorong terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan tingkat capaian target indikator kinerja utama sasaran strategis (IKU Renstra) yang tertuang dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja dan capaian target indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan realiasi tolak ukur kinerja dengan target indikator kinerja kegiatan yang meliputi: *input*, *output*, dan *outcome*. Sedangkan pencapaian indikator program dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target realisasi indikator program. Instrumen pengukuran kinerja yang digunakan terdiri dari:

- 1) Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- 2) Penetapan Kinerja (PK);
- 3) Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK);
- 4) Pengukuran Pencapaian Tolak Ukur Kinerja Kegiatan (*input*, *output* dan *outcome*); dan
- 5) Analisis Efisiensi dan Efektifitas;

III.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TRIWULAN IV TAHUN 2025

Hasil Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas Perikanan dengan Bupati Luwu Timur.

Pengukuran tersebut menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 :
Pengukuran Perjanjian Kerja Eselon II Triwulan IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	106.307 Ton	80.392,05 Ton	75,62	Berhasil
		Jumlah Produksi Hasil Olahan	155 Ton	186,56 Ton	120,36	Sangat Berhasil

		Perikanan				
		Nilai Tukar Nelayan (NTN dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	100 Persen	118,44 Persen	118,44	Sangat Berhasil
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	74	-	-	-

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja pada 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Produktivitas Perikanan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja :

- Jumlah Produksi Perikanan.* Indikator kinerja produksi perikanan merupakan seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan.
- Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan.* Indikator Kinerja Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan adalah Kegiatan transformasi bahan baku hasil perikanan (seperti ikan, udang, rumput laut) menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi yang lebih tinggi melalui proses pengolahan.
- Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi).* Indikator kinerja NTN dan NTPi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemampuan tukar hasil produksi perikanan terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi dan produksi, dimana nilai

lebih dari 100 menunjukkan pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran.

Indikator Kinerja 1 : Jumlah Produksi Perikanan

Jumlah produksi perikanan merupakan gabungan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan pada Triwulan IV tahun 2025 yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan.

Tabel 3.2 :
Capaian Jumlah Produksi Perikanan Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran Strategis 1			Meningkatnya Produktivitas Perikanan					
Indikator Kinerja 1			Jumlah Produksi Perikanan					
Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Tahun	Standar Provinsi	Standar Nasional
			Target	Realisasi	% Capaian			
83.510,7 6	89.882,90	107.051,4 7	106.307	80.392,05	75,62	427.536	1.316.708	6.660.000

Pencapaian produksi perikanan pada Triwulan IV tahun 2025 sebesar 80.392,05 Ton atau 75,62 % terhadap target 106.307 Ton yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Triwulan IV tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan realisasi Triwulan IV tahun 2024, maka mengalami penurunan sebesar 26.659,42 Ton.

Perbandingan capaian kinerja jumlah produksi perikanan Triwulan IV tahun 2025 dengan Triwulan IV tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada diagram berikut ini :

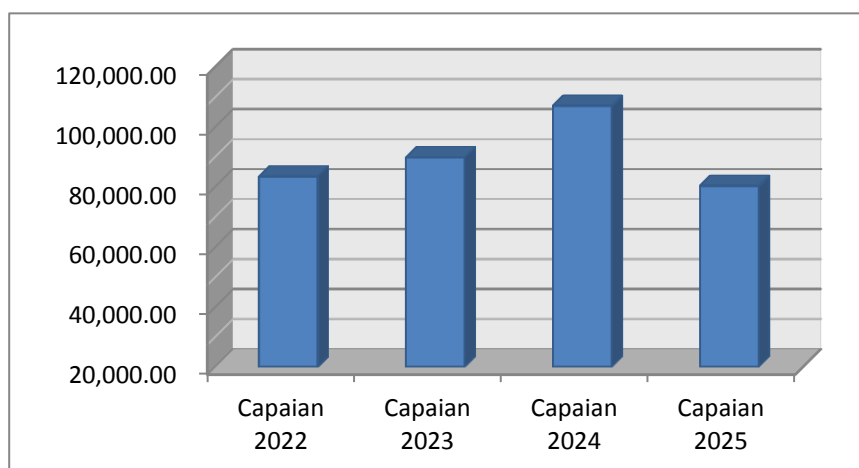


Diagram 3.1 :
Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Triwulan IV
Tahun 2022-2025

Pada diagram di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 1 (satu) Jumlah Produksi Perikanan Triwulan IV pada tahun 2025 menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Salah satu pemicu sehingga hasil produksi perikanan ini berkurang adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem dimana peningkatan suhu air laut dan perubahan kondisi cuaca yang tidak menentu (seperti gelombang tinggi dan angin kencang) dapat mempengaruhi migrasi ikan, menurunkan daya tahan tubuh ikan terhadap penyakit, dan menghambat nelayan untuk melaut..

Capaian kinerja produksi perikanan Triwulan IV tahun 2025 dengan target akhir tahun, Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target akhir tahun sebesar 427.536 Ton, sedangkan realisasi Triwulan IV tahun 2025 sebesar 80.392,05 ditambah realisasi Triwulan III sebesar 85.078,66 Ton. Realisasi Triwulan II sebesar 156.172,96 Ton dan realisasi Triwulan I sebesar 142.333,26 Ton, artinya realisasi sampai saat ini sebesar 463.976,93 Ton atau 108,52 Persen, telah melebihi dari target tahunan.

Sedangkan perbandingan capaian kinerja produksi perikanan tahun 2025 dengan target Provinsi dan Nasional Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada Triwulan IV tahun 2025 Kabupaten

Luwu Timur berkontribusi sebesar 35,23 % terhadap target pencapaian produksi perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk pencapaian target nasional, Kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 6,96 %.

Indikator Kinerja 2 : Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan

Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan adalah Kegiatan transformasi bahan baku hasil perikanan (seperti ikan, udang, rumput laut) menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi yang lebih tinggi melalui proses pengolahan yang dihasilkan pada Triwulan IV tahun 2025.

Tabel 3.3 :
Capaian Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran Strategis 1			Meningkatnya Produktivitas Perikanan					
Indikator Kinerja 2			Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan					
Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Tahun	Standar Provinsi	Standar Nasional
			Target	Realisasi	% Capaian			
201,53	157,88	176,33	155	186,56	120,36	618	-	-

Pencapaian Produksi Hasil Olahan Perikanan pada Triwulan IV tahun 2025 sebesar 186,56 Ton atau 120,36 % terhadap target 155 Ton yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Triwulan IV tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan realisasi Triwulan IV tahun 2024, maka mengalami peningkatan sebesar 10,23 Ton.

Perbandingan capaian kinerja jumlah produksi hasil olahan perikanan Triwulan IV tahun 2025 dengan Triwulan IV tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada diagram berikut ini :

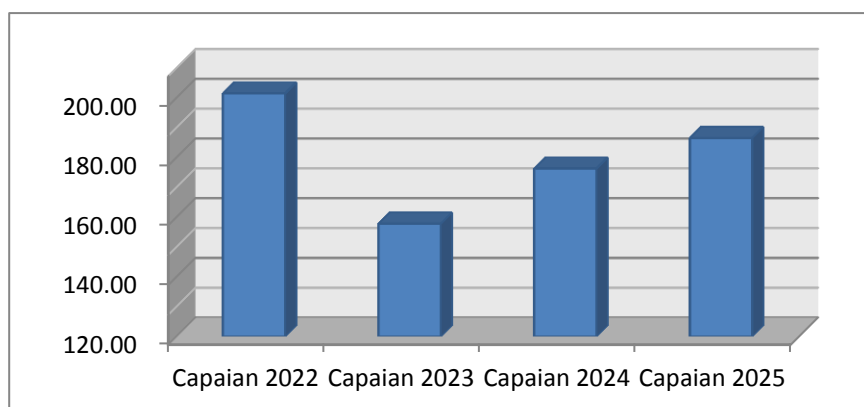


Diagram 3.2 :
Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan
Triwulan IV Tahun 2022-2025

Pada diagram di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 2 (dua) Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan Triwulan IV dari tahun 2022 sampai tahun 2025 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan hasil olahan perikanan disebabkan oleh kombinasi berbagai factor, terutama terkait ketersediaan bahan baku, kemajuan teknologi pengolahan, dukungan kelembangaan dan pemerintah, serta permintaan pasar yang tinggi.

Capaian kinerja Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan Triwulan IV tahun 2025 dengan target akhir tahun, Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target akhir tahun sebesar 618 Ton, sedangkan realisasi Triwulan IV tahun 2025 sebesar 186,56 ditambah realisasi Triwulan III sebesar 139,04 Ton. Realisasi Triwulan II sebesar 111,16 Ton dan realisasi Triwulan I sebesar 126,29 Ton, artinya realisasi sampai saat ini sebesar 563,05 Ton atau 91,11 Persen.

Indikator Kinerja 3 : Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)

Indikator ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemampuan tukar hasil produksi perikanan terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi dan produksi, dimana nilai

lebih dari 100 menunjukkan pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran dihasilkan pada Triwulan IV tahun 2025.

Tabel 3.4 :
Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran Strategis 1			Meningkatnya Produktivitas Perikanan					
Indikator Kinerja 2			Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)					
Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Tahun	Standar Provinsi	Standar Nasional
			Target	Realisasi	% Capaian			
115,21	119,25	118,97	100	118,44	118,44	100	-	-

Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada triwulan IV ini terutama di bulan desember sebesar 118,44 dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) sebesar 112,76. Apabila dibandingkan dengan realisasi Triwulan IV tahun 2024, tidak mengalami perubahan yang drastis.

Perbandingan capaian kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) Triwulan IV tahun 2025 dengan Triwulan IV tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada diagram berikut ini :

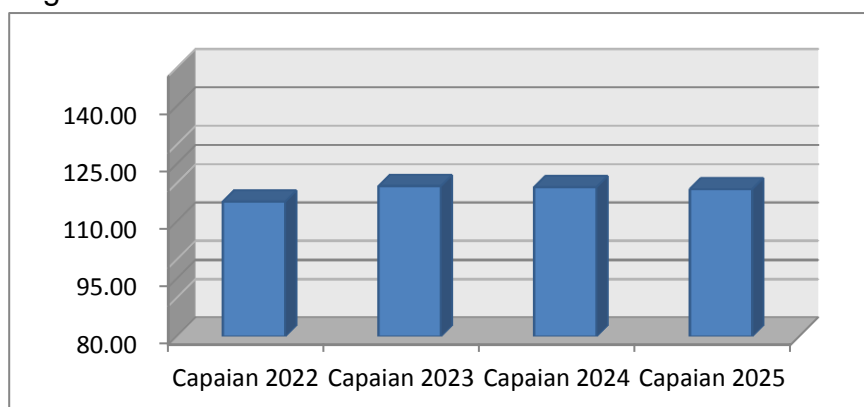


Diagram 3.3 :
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) Triwulan IV Tahun 2022-2025

Pada diagram di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 3 (Dua) Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) Triwulan IV dari tahun 2022 sampai

tahun 2025 menunjukkan perubahan angka yang tidak terlalu berubah.

Upaya pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan** didukung oleh 2 (dua) program yang dirincikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 :
Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Produktivitas Perikanan Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran	Program	Indikator Program	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.082 Ton	3.062,79 Ton	147,10 %
	Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	104.225 Ton	77.329,26 Ton	74,19 %

Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Triwulan IV tahun 2025 sektor perikanan budidaya lebih mendominasi di banding sektor perikanan tangkap dalam pencapaian produktifitas sector perikanan. Data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERIKANAN TANGKAP

Produksi perikanan tangkap pada Triwulan IV tahun 2025 dengan target sebesar 2.082 Ton, yang teralisasi sebesar 3.062,79 ton atau sebesar 147,10 Persen, yang terdiri dari hasil tangkapan ikan laut sebesar 2.991,17 Ton dan hasil tangkapan ikan danau sebesar 71,61 Ton, telah melampau target yang ditetapkan. Produksi perikanan tangkap di laut dan danau didominasi oleh 5 (lima) jenis ikan yakni Tongkol, Tembang, Layang, Teri, Kembung, Pangkilang dan Nila. dapat dilihat pada table dibawah:

Tabel 3.6 :
Data per Jenis Ikan Laut

No	Jenis komoditi	Jumlah Produksi (Ton)
1	Ikan Baronang	93,61
2	Balanak	75,84
3	Cakalang (sKj)	162,66
4	Cumi Cumi	31,35
5	Gerot-gerot	0,87
6	Kakap merah	9,36
7	Kakap putih	112,54
8	Kembung/layang	719,19
9	Kepiting bakau	112,14
10	Kerapu karang	61,56
11	Kerapu lumpur	7,33
12	Kerapu sunu	9,95
13	Kerong2	86,03
14	Kurisi	59,52
15	Kuwe	162,58
16	Pari kekeh	22,44
17	Peperek	115,52
18	Tembang/IPKL/Selar	639,18
19	Tenggiri	1,75
20	Teri nasi	248,61
21	Tongkol	251,86
22	Udang jerbung	7,77
Jumlah		2.991,17

Tabel 3.7 :
Data per Jenis Ikan Danau

No	Jenis komoditi	Jumlah Produksi (Ton)
1	Bilih	26,49
2	Gabus/lainx	4,51
3	Mas	1,24
4	Mujair	9,52
5	Nila	29,85
Jumlah		71,61

PERIKANAN BUDIDAYA

Produksi perikanan budidaya Triwulan IV tahun 2025 dengan target sebesar 104.225 ton, yang terealisasi sebesar 77,329,26 atau sebesar 74,19 persen. Capaian produksi perikanan budidaya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu pemicu sehingga hasil produksi perikanan budidaya ini berkurang adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem dimana peningkatan suhu air laut dan perubahan kondisi cuaca yang tidak menentu yang dapat mempengaruhi menurunkan daya tahan tubuh ikan terhadap penyakit. Total produksi perikanan

budidaya pada triwulan IV tahun 2025 didominasi oleh komoditas perikanan budidaya diantaranya Rumput Laut (*Eucheuma cottoni*), Rumput Laut (*Gracillaria*) Bandeng (*Chanos chanos*).

Tabel 3.8 :
Data Produksi Perikanan Budidaya per Komoditi

No	Jenis komoditi	Jumlah Produksi (Ton)
1	Ikan Mas	104,45
2	Ikan Nila	75,24
3	Ikan Lele	75,43
4	Ikan Betok	0,03
5	Ikan Bawal Tawar	2,66
6	Ikan Bandeng	1.078,04
7	Ikan Mujair	47,55
8	Ikan Gurame	4,30
9	Udang Windu	132,57
10	Udang Api – Api	330,28
11	Udang Vaname	350,18
12	Kepiting	42,40
13	Rumput Laut Cattoni	47.198,12
14	Rumput Laut Gracillaria	27.888,41
	Jumlah	77.329,26

2. SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk indicator kinerja Nilai AKIP menggunakan rumus N-1. Berhubung di Triwulan IV tahun 2025 penilai Lakip belum dapat dilaksanakan sehingga target dan pencapaian untuk indicator ini belum ada.



Bab IV

Penutup



BAB IV PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja per triwulan yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Perikanan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2025 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 untuk semua sasaran strategis berikut indikator kinerjanya secara umum belum cukup bagus. Dengan demikian, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan belum terwujud.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama, persentase capaian realisasi indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan, Jumlah Produksi hasil olahan perikanan, serta Nilai tukar nelayan (NTN) dan nilai tukar pembudidaya perikanan (NTPi) sudah dapat diukur sedangkan indikator kinerja Nilai Akip belum dapat diukur.

IV.2 SARAN

1. Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas utama program dan kebutuhan pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
2. Mengusulan penambahan aparatur untuk meningkatkan kinerja organisasi Dinas Perikanan antara lain staf pengelola kegiatan dan petugas teknis lapangan;
3. Perlu dilakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan; dan

4. Perlu dilakukan pemetaan potensi kelautan dan perikanan baik secara manual maupun digital melalui metode pemetaan GIS (*Geographical Information System*) atau metode lainnya.

Semoga Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Secara spesifik, bagi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dapat dijadikan sebagai umpan balik dan acuan perencanaan tahun berikutnya,

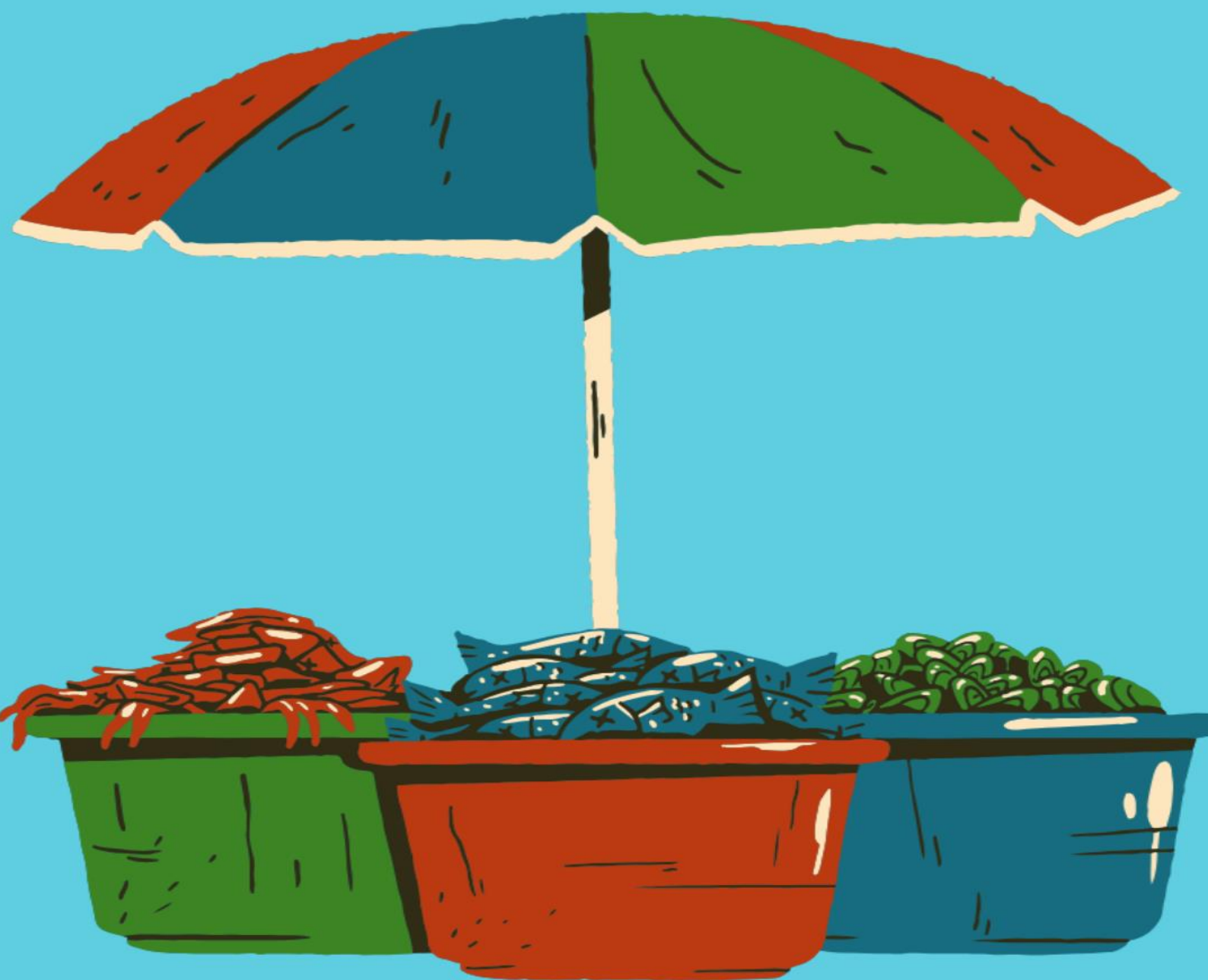
Demikianlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2025 ini, disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja, yang merupakan wujud peran serta Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung Penguatan Otonomi Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 02 Januari 2026
KEPALA DINAS

ANDI WIJA HASAN, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip 197403232003121004



Lampiran



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIMULAN IV
Dinas Perikanan


No		Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan					
					5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
1		2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Semua Bidang																													
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urutan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	96.60	#####	90.34	4,773,636,921	100	5,231,572,137	-	987,918,646	-	1,070,886,311	-	1,022,021,980	-	1,602,573,560	99	4,683,400,497	98.56%	89.52%	NAN	9,457,037,418		26.42%	Dinas Perikanan		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%)	100.00	542,290,550	121,126,541		100	102,290,550	35	11,700,000	18	11,909,340	29	26,910,067	18	50,829,164	100	101,348,571	100.00%	99.08%	0.00	222,475,112	0.00%	128.94%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11.00	186,000,800	38,062,600		3	26,000,800	1	7,500,000	1	7,579,670	1	6,701,549	-	3,979,464	3	25,760,683	100.00%	99.08%	3.00	63,813,283	27.27%	34.31%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp240.117 yang merupakan selisih harga ekatalog	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10.00	44,373,000	2.00	4,288,750	2	4,373,000	-	-	-	-	2	3,220,484	-	948,273	2	4,168,751	100.00%	95.33%	4.00	8,457,507	40.00%	19.06%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp204.243 yang merupakan selisih harga ekatalog	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	10.00	45,158,500	2.00	5,534,000	2	5,158,500	1	-	-	1,109,890	-	1,083,027	1	2,746,724	2	4,939,641	100.00%	95.76%	4.00	10,473,641	40.00%	23.19%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp218.859 yang merupakan selisih harga ekatalog	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	50.00	266,758,250	10.00	73,251,191	10	66,758,250	4	4,200,000	2	3,219,780	2	15,905,007	2	43,154,703	10	66,479,490	100.00%	99.98%	20.00	139,730,681	40.00%	52.38%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp278.760 yang merupakan selisih harga ekatalog	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (%)	100.00	#####	3,344,624,240		100	4,004,458,137	23	825,585,460	26	912,496,597	23	728,459,288	27	1,050,918,016	99	3,517,459,761	98.85%	87.84%	0.00	6,862,084,001	0.00%	62.52%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	220.00	#####	104.00	3,257,621,609	47	3,945,803,137	27	817,905,460	27	902,476,597	27	717,057,097	47	1,021,622,133	128	3,459,061,687	100.00%	87.66%	232.00	6,716,683,292	105.45%	24.12%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp486.741.450 yang merupakan gaji CPNS dan PPPK yang disiapkan 4 bulan namun terbayar hanya 3 bulan km 1 bulannya masih dibayarkan di BKAD, tunjangan fungsional PPPK yang tidak dibayarkan karena belum adanya SK Fungsional dan masih berupa Berita Acara, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayarkan dan terlebih dahulu mendapatkan SK mutasi, serta pemotongan TPP karena keterlambatan kehadiran.	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran n SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	90.00	378,655,000	18.00	87,002,639	18	58,655,000	4	7,680,000	5	10,020,000	4	11,402,191	5	29,295,883	18	58,398,074	100.00%	99.56%	36.00	145,400,709	40.00%	38.40%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp256.926 yang merupakan selisih harga ekatalog	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset Teradministrasi (%)	100.00	238,052,000	52,264,050		100	38,052,000	25	8,136,800	25	8,579,200	25	9,064,010	25	11,995,784	100	37,775,794	100.00%	99.27%	0.00	90,039,844	0.00%	37.82%			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		238,052,000	4.00	52,264,050	4	38,052,000	1	8,136,800	1	8,579,200	1	9,064,010	1	11,995,784	4	37,775,794	100.00%	99.27%	8.00	90,039,844	0.00%	37.82%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp276.206 yang merupakan selisih harga ekatalog	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100.00	59,216,500	14,612,000		100	11,216,500	2	1,000,000	-	1,939,560	-	1,822,433	96	5,814,883	97	10,576,876	97.40%	94.30%	0.00	25,188,876	0.00%	42.54%			
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	20.00	59,216,500	4.00	14,612,000	4	11,216,500	1	1,000,000	1	1,939,560	1	1,822,433	1	5,814,883	4	10,576,876	100.00%	94.30%	8.00	25,188,876	40.00%	42.54%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp639.624 yang merupakan selisih harga ekatalog dan sisa honorarium bendahara penerimaan karena adanya retribusi yang dihapuskan.	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar (%)	100.00	477,209,850	99,391,570		100	77,209,850	12	3,000,000	20	11,174,780	20	8,044,196	40	44,169,805	92	66,388,771	92.00%	85.98%	0.00	165,780,341	0.00%	66.43%			
			Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60.00	134,829,850	12.00	25,484,300	12	14,829,850	3	3,000,000	3	2,219,780	3	1,611,586	3	7,751,305	12	14,582,671	100.00%	98.33%	24.00	40,066,971	40.00%	29.72%		Terdapa sisa anggaran sebesar Rp247.179 yang merupakan selisih harga ekatalog	

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	45,00	342.380,00	8,00	73.907.270	13	62.380,000	-	-	2	8.955.000	2	6.432.600	8	36.418.500	12	51.806,100	92,31%	83,65%	20,00	125.713,370	44,44%	36,72%			Terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.573.900 karena beberapa bimtek yang diikuti kontribusinya dianggung oleh pihak penyelenggara (BKPSDM).
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Tetap Waktu (%)	100,00	2.740.951,000		725.430,067	100	387.005,600	16	65.570,041	24	38.084,300	23	78.942,030	35	196.535,128	99	379.131,499	98,75%	97,97%	0,00	1.104,561,566	0,00%	262,64%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	58,00	46.864,000	12,00	6.818,000	10	6.864,000	10	1.710,000	10	1.617,000	10	1.716,000	10	1.775,000	10	6.818,000	100,00%	99,33%	22,00	13.636,000	37,93%	29,10%			Terdapat sisa anggaran sebesar Rp46.000 yang merupakan selisih harga toko
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	26,00	268.170,000	6,00	121.050,000	7	108.170,000	-	-	2	-	-	33.088,800	5	70.613,400	7	103.702,200	100,00%	95,87%	13,00	224.752,200	50,00%	83,81%			Terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.467.800 yang merupakan selisih harga ektalog
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	104,00	70.641,000	20,00	10.630,000	20	10.641,000	17	2.106,000	17	2.341,000	19	1.627,000	20	3.712,000	20	9.786,000	100,00%	91,97%	40,00	20.416,000	38,46%	28,90%			Terdapat sisa anggaran sebesar Rp855.000 yang merupakan selisih harga ektalog
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20,00	67.930,000	4,00	8.930,000	4	7.930,000	-	-	1	540,000	2	3.035,850	4	3.812,068	4	7.387,918	100,00%	93,16%	8,00	16.317,918	40,00%	24,02%			Terdapat sisa anggaran sebesar Rp542.061,70 yang merupakan selisih harga ektalog
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	288,00	47.500,000	48,00	5.900,000	48	7.500,000	9	925,000	12	1.275,000	18	1.875,000	9	2.100,000	48	6.175,000	100,00%	82,33%	96,00	12.075,000	33,33%	25,42%			Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.125.000 yang merupakan selisih belanja surat kabar/majalah yang bersifat disediakan
		Facilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	60,00	72.830,000	12,00	13.007,000	12	12.830,000	3	3.300,000	3	-	3	6.427,500	3	2.638,000	12	12.365,500	100,00%	96,38%	24,00	25.372,500	40,00%	34,84%			Terdapat sisa anggaran sebesar Rp464.500 yang merupakan selisih harga ektalog
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60,00	2.167.016,098	12,00	559.095,087	12	233.070,600	3	57.529,041	3	32.311,300	3	31.171,880	3	111.884,660	12	232.896,881	100,00%	99,95%	24,00	791.991,948	40,00%	36,55%			Terdapat sisa anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp173.719 yang tidak direalisasikan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan (%)	100,00	650.160,000		59.016,780	100	100.160,000	-	-	-	-	92	63.680,100	8	34.499,998	100	98.180,098	100,00%	98,02%	0,00	157.196,878	0,00%	58,97%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	71,00	500.160,000			63	100.160,000	-	-	-	-	58	63.680,100	5	34.499,998	63	98.180,098	100,00%	98,02%	63,00	98.180,098	88,73%	19,63%			Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.979.902 yang merupakan selisih harga ektalog
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3,00	150.000,000	1,00	59.016,780	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	59.016,780	33,33%	39,34%			Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa sesuai Kebutuhan (%)	100,00	1.937.226,500		239.739,973	100	297.226,500	25	58.592.938	25	54.137,312	25	69.724,138	25	92.059,123	100	274.513,511	100,00%	92,38%	0,00	514.253,484	0,00%	72,76%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60,00	47.282,500	12,00	3.455,000	12	7.282,500	3	1.310,000	3	219,780	3	2.960,903	3	1.455,765	12	5.946,448	100,00%	81,65%	24,00	9.401,448	40,00%	19,88%			Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.336.052 yang merupakan selisih harga ektalog
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60,00	908.624,000	12,00	75.194,973	12	108.624,000	3	18.282,938	3	20.837,532	3	22.183,235	3	38.663,358	12	99.967,063	100,00%	92,03%	24,00	175.152,036	40,00%	19,28%			Terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.656.937 yang merupakan selisih pembayaran belanja tagihan air, listrik dan internet yang bersifat disediakan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60,00	981.320,000	12,00	161.100,000	12	181.320,000	3	39.000,000	3	33.080,000	3	44.580,000	3	51.940,000	12	168.600,000	100,00%	92,98%	24,00	329.700,000	40,00%	33,60%			Terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.720.000 yang terdiri dari adanya 1 (satu) orang jasa tenaga kebersihan yang dibayarkan hanya 11 bulan karena mengundurkan diri, 1 (satu) orang jasa tenaga keamanan yang dibayarkan hanya 7 (tujuh) bulan karena mengundurkan diri, serta pejabat pengadaan yang dibayarkan hanya 10 bulan berdasarkan SK Pejabat Pengadaan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Dipelihara secara Berkala (%)	100,00	913.963,000		117.431,700	100	213.953,000	20	14.333,407	36	32.564,822	23	35.375,728	23	115.751,659	100	198.025,616	100,01%	92,56%	0,00	315.457,316	0,00%	101,15%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	115,00	557.050,000	23,00	66.619,700	23	157.050,000	3	9.143,407	12	14.093,822	5	28.925,728	3	89.198,659	23	141.361,616	100,00%	90,01%	46,00	207.981,316	40,00%	37,34%			Terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.688.384 yang merupakan belanja pajak, servis dan penggantian suku cadang kendaraan yang bersifat disediakan, serta sisa pemeliharaan speedboat yang tidak dihabiskan karena adanya pemeliharaan speedboat secara keseluruhan.
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	200,00	123.300,000	40,00	23.320,000	40	23.300,000	10	5.190,000	10	4.560,000	10	6.450,000	10	6.980,000	40	23.180,000	100,00%	99,48%	80,00	46.500,000	40,00%	37,71%			Terdapat sisa anggaran sebesar Rp120.000 yang merupakan selisih harga pemeliharaan peralatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15,00	233.603,000	3,00	27.492,000	4	33.603,000	-	-	1	13.911,000	-	-	3	19.573,000	4	33.484,000	100,00%	99,65%	7,00	60.976,000	46,67%	26,10%			Terdapat sisa anggaran sebesar Rp119.000 yang merupakan selisih harga pemeliharaan gedung

		Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																											
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	11515.00	#####	10481.44	2,006,241,943	10639	4,902,701,450	-	343,527,959	-	20,881,210	-	21,841,257	-	4,405,546,865	10,790	4,791,797,291	101.42%	97.74%			6,798,030,234	25.24%	Dinas Perikanan	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disusutkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap (Persen)	100.00	#####	98.77	1,797,825,646	100	4,229,157,260	-	328,994,959	-	4,724,450	-	8,352,119	100	3,808,473,362	100	4,150,544,890	100.00%	98.14%	98.77	5,948,370,536	98.77%	100.75%		
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	*Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	20.00	258,308,300	4.00	44,622,600	4	46,308,300	1	8,130,000	1	4,724,450	1	8,352,119	1	24,610,717	4	45,817,286	100.00%	98.94%	8.00	90,439,886	40.00%	35.01%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp491.014 yang merupakan selisih harga ekatalog
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	21.00	5,492,448,960	8.00	1,753,203,046	3	898,448,960	-	320,864,959	-	-	-	-	3	571,902,878	3	892,767,837	100.00%	99.37%	11.00	2,645,970,883	52.38%	48.17%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.681.122,68 yang merupakan selisih harga pengadaan (kontrak) dan selisih biaya administrasi
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	78.00	#####			18	3,284,400,000	-	-	-	-	-	-	18	3,211,959,767	18	3,211,959,767	100.00%	97.79%	18.00	3,211,959,767	23.08%	17.57%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp72.440.233 yang merupakan selisih harga ekatalog (surat pesanan pengadaan) dan biaya administrasi
		Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelompok nelayan yang dibudayakan (Persen)	100.00	517,080,300	100.00	145,232,237	100	97,080,300	6	14,533,000	6	16,156,760	6	13,489,138	82	51,397,813	100	95,576,711	100.00%	98.45%	100.00	240,808,948	100.00%	100.55%		
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	180.00	288,871,300	20.00	26,227,000	40	28,871,300	-	-	-	219,780	-	6,799,382	40	20,727,454	40	27,746,616	100.00%	96.10%	60.00	53,973,616	33.33%	18.68%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.124.684 yang merupakan selisih harga ekatalog
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelenbagaan Nelayan Kecil	*Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelenbagaannya (Kelompok)	131.00	228,209,000	12.00	119,005,237	11	68,209,000	3	14,533,000	3	15,936,980	3	6,689,756	2	30,670,359	11	67,830,090	100.00%	99.44%	23.00	186,835,332	17.56%	81.87%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp378.905 yang merupakan selisih harga ekatalog
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dipoperasikan sesuai dengan standar (Persen)	100.00	2,376,463,890	87.50	63,184,060	86	576,463,890	88	-	88	-	88	-	88	545,675,690	88	545,675,690	101.74%	94.66%	87.50	608,859,750	87.50%	25.62%		
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	9.00	2,376,463,890	1.00	63,184,060	3	576,463,890	-	-	-	-	-	-	3	545,675,690	3	545,675,690	100.00%	94.66%	4.00	608,859,750	44.44%	25.62%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp30.788.200 yang merupakan selisih harga pengadaan (kontrak) dan selisih biaya administrasi serta jasa tenaga pelayanan umum

		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan (Persen)	100.00	=====	94.74	2,842,195,369	100	4,138,900,089	-	150,502,032	-	55,438,540	-	115,877,402	100	3,729,404,458	100	4,051,222,432	100.00%	97.88%	94.74	6,893,417,800	94.74%	126.79%		
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20.00	320,998,900	4.00	64,019,900	4	40,998,900	1	8,861,500	1	8,666,890	1	8,817,403	1	14,387,327	4	40,733,120	100.00%	99.38%	8.00	104,753,020	40.00%	32.63%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp265.780 yang merupakan selisih harga ekatalog
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	44.00	=====	15.00	2,715,271,069	9	1,963,406,689	-	92,106,751	-	-	-	58,344,215	9	1,798,076,071	9	1,948,527,037	100.00%	99.24%	24.00	4,663,798,109	54.55%	36.51%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.879.653,31 yang merupakan selisih harga pengadaan (kontrak) dan selisih biaya administrasi
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	20.00	498,296,000	4.00	62,904,400	4	98,296,000	1	14,810,181	1	27,795,290	1	14,330,401	1	15,305,136	4	72,241,008	100.00%	73.49%	8.00	135,145,408	40.00%	27.12%		Biaya pengujian sampel tidak terealisasi karena bersifat disediakan ketika ada kejadian seperti kematian ikan secara massal untuk dilakukan uji penyebab kejadian tersebut, dan tahun ini tidak ada kejadian yang terjadi.
		Pengiriman Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	112.00	=====			12	1,833,912,000	-	-	-	-	-	-	12	1,819,205,341	12	1,819,205,341	100.00%	99.20%	12.00	1,819,205,341	10.71%	12.42%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.706.659 yang merupakan selisih harga ekatalog (surat pesanan pengadaan)
		Perencanaan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	*Jumlah Usulan Dokumen Pendaftaran dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	9.00	942,286,500			1	202,286,500	-	34,723,600	-	18,976,360	-	34,385,383	1	82,430,583	1	170,515,926	100.00%	84.29%	1.00	170,515,926	11.11%	18.10%		Biaya indukan tidak terealisasi karena tempat untuk membeli indukan ikan belum memperbahui sertifikat CBIB nya
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	97.39%					
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Keptuhan Pelaku Usaha Kp Terhadap Ketertarikan Perikanan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Persen)	97.20	591,496,500	96.00	-	96	56,496,500	-	4,508,400	-	2,716,560	-	21,133,517	-	26,445,570	96	54,804,047	100.00%	97.00%	NAN	54,804,047	0.00%	9.27%		Dinas Perikanan
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dilakukan (Persen)	100.00	591,496,500	-		100	56,496,500	100	4,508,400	100	2,716,560	100	21,133,517	100	26,445,570	100	54,804,047	100.00%	97.00%	0.00	54,804,047	0.00%	9.27%		
		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	5550.00	591,496,500			4000	56,496,500	1,000	4,508,400	1,000	2,716,560	1,000	21,133,517	1,000	26,445,570	4,000	54,804,047	100.00%	97.00%	4000.00	54,804,047	72.07%	9.27%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp892.453 yang merupakan selisih harga ekatalog
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	97.00%					
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	48.47	=====	47.15	957,825,724	47.59	5,655,247,300	-	30,127,800	-	21,173,540	-	49,378,584	-	396,671,260	48	497,351,184	100.97%	8.70%	NAN	1,455,176,908	10.57%			Dinas Perikanan
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengolahan hasil perikanan (RTP) (Persen)	100.00	-	100.00	-	100	155,710,200	100	12,510,600	100	12,841,820	100	40,843,896	100	23,050,779	100	89,247,099	100.00%	57.32%	100.00	89,247,099	100.00%	0.00%		
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	*Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	-	-	-	-	4	155,710,200	1	12,510,600	1	12,841,820	1	40,843,896	1	23,050,779	4	89,247,099	100.00%	57.32%	4.00	89,247,099	0.00%	0.00%		Belanja sewa stand pameran dan alat/bahan untuk kegiatan pameran tidak terealisasi sepenuhnya karena anggaran tersebut bersifat disediakan dan stand untuk kegiatan pameran yang diikuti dibiayai oleh DPM-PTSP
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (Persen)	83.00	563,713,100	83.00	-	83	163,713,100	-	6,000,000	-	7,087,520	-	8,534,688	83	134,552,858	83	156,175,066	100.00%	95.40%	83.00	156,175,066	100.00%	27.70%		
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	34.00	563,713,100			10	163,713,100	-	6,000,000	2	7,087,520	6	8,534,688	2	134,552,858	10	156,175,066	100.00%	95.40%	10.00	156,175,066	29.41%	27.70%		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.538.034,50 yang merupakan selisih harga ekatalog, selisih honorarium narasumber, serta belanja hadiah (trophy/piala) yang tidak direalisasikan

		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Itam dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (Persen)	73.00	#####	73.00	957,825,724	73	5,335,824,000	-	11,617,200	-	1,244,200	-	-	73	239,067,623	73	251,929,023	100.00%	4.72%	73.00	1,209,754,747	100.00%	9.16%		
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	43.00	#####	1.00	957,825,724	6	5,335,824,000	-	11,617,200	-	1,244,200	-	-	1	239,067,623	1	251,929,023	16.67%	4.72%	2.00	1,209,754,747	4.65%	9.16%		Program yang mendukung pandu juara tidak terlaksana karena ketidaksiapan desa mengelola, adanya perubahan skema, serta keterbatasan waktu mengingat anggaran yang besar dengan mesin pres dan jaringan listrik Gudang Rumpul Laut diambil alih oleh PT Luwu Timur Gemilang sebagai penyertaan modal sehingga tidak bisa dilaksanakan.
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										21.37%	8.75%						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
									20,170,420,676	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										77.93%	70.59%						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Tinggi	Sedang						

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya*):		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Lampiran 2 : Dokumentasi Evaluasi Kinerja Triwulan IV



Lampiran 3 : Dokumentasi Kegiatan



BIDANG PERIKANAN TANGKAP



Pendataan Statistik Perikanan Tangkap



Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil



Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil



Penyerahan Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Ikan



Pembangunan Tambatan Perahu dan TPI



Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA



Pendataan Statistik Bidang Perikanan Budidaya



Pengukuran Kualitas Air, Kadar Garam (Salinitas) dan Parameter pH



Pendampingan Kelompok Pembudidaya



Pengembangan Kapasitas bagi Pembudidaya Perikanan



Penyerahan Sarana Pembudidayaan Ikan



Pembangunan Jalan Produksi dan Jembatan Tambak

BIDANG DIVERSIFIKASI HASIL PERIKANAN



Pendataan Statistik Pengolahan Hasil Perikanan



Pembinaan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan dan Sosialisasi Gemarikan



Pelatihan Olahan Ikan dan Lomba Cipta Menu

UPTD BALAI BENIH IKAN



Proses Pemijahan bibit ikan